



TUGAS INDIVIDU

Nama : ARRAFLY AZIZ SAPUTRA
NPM : D1A240028
Kelas : 1B
Prodi : Sistem Informasi
Semester : 1 Ganjil
Matkul : Kepemimpinan Dan Manajemen Organisasi
Dosen : Rusnedi AG, S.Kom, M.P
Materi Tugas : Membuat Struktur Organisasi bebas

BAB II ASAS, STRUKTUR, DAN DESAIN ORGANISASI

A. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



B. Asas organisasi pemerintahan desa

Asas-asas yang mendasari organisasi pemerintahan desa umumnya mengacu pada prinsip-prinsip dasar administrasi pemerintahan yang efektif dan partisipatif. Asas ini penting untuk menjaga transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Beberapa asas utama dalam organisasi pemerintahan desa adalah:

1. Asas Desentralisasi

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri, yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah.

2. Asas Otonomi

Pemerintah desa memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi desa.

3. Asas Partisipasi

Masyarakat desa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program.

4. Asas Transparansi

Semua informasi terkait pemerintahan desa harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

5. Asas Akuntabilitas

Pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi kebijakan, keuangan, maupun pelaksanaan tugas.

6. Asas Efektivitas dan Efisiensi

Pemerintah desa harus dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan cara yang hemat dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

C. Desain dan Pendekatan dalam struktur organisasi Desa

Pendekatan dalam mendesain organisasi pemerintahan desa harus mempertimbangkan aspek kebutuhan dan karakteristik lokal desa tersebut. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat digunakan:

1. **Pendekatan Fungsional** : Fokus utama dari desain ini adalah membagi tugas dan wewenang berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang ada di desa. Misalnya, membedakan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan.
2. **Pendekatan Partisipatif** : Mendesain organisasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan desa, sehingga kebijakan yang diambil lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat.

3. **Pendekatan Terpadu** : Organisasi desa didesain untuk bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga di luar desa, seperti lembaga swasta, pemerintah daerah, atau organisasi masyarakat sipil, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan.
4. **Pendekatan Dinamis** : Organisasi desa harus dirancang agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, baik dalam hal kebijakan nasional, dinamika ekonomi, maupun kebutuhan masyarakat desa yang berkembang.

D. Faktor Penentu struktur organisasi

Faktor-faktor yang menentukan struktur organisasi pemerintahan desa meliputi:

1. **Ukuran Desa** : Jumlah penduduk dan luas wilayah desa akan mempengaruhi seberapa kompleks struktur organisasi desa. Desa yang besar mungkin membutuhkan lebih banyak perangkat untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan.
2. **Kebutuhan Lokal** : Setiap desa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Desa yang berbasis pertanian mungkin lebih membutuhkan kaur yang terkait dengan pertanian, sementara desa wisata akan memerlukan kaur yang fokus pada pariwisata.
3. **Sumber Daya Manusia** : Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten juga memengaruhi struktur organisasi desa. Desa yang memiliki banyak warga berpendidikan tinggi atau berpengalaman dalam administrasi akan memiliki struktur yang lebih efektif.
4. **Anggaran Desa** : Kemampuan keuangan desa juga sangat berpengaruh. Desa dengan anggaran besar mungkin dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk memperluas struktur dan fungsi organisasinya.
5. **Kebijakan Nasional/Daerah** : Peraturan dari pemerintah pusat atau daerah, seperti UU Desa, sangat mempengaruhi desain dan struktur organisasi desa. Pemerintah desa harus patuh pada regulasi yang berlaku, namun tetap menyesuaikan dengan konteks lokal.